

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Pengantar

Pada bab ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Adapun landasan teori dan teori-teori yang mendasari variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini akan dipaparkan secara ringkas. Selain itu penulis akan memaparkan berbagai penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan yang mendasari hipotesis yang akan terbentuk serta kerangka pemikiran dari penulis.

#### B. Landasan Teoritis

Berikut pembahasan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Tata Kelola Perusahaan

Definisi tata kelola korporat menurut Gumanti (2017 : 267) adalah sistem peraturan, praktik dan proses dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tata kelola korporat muncul sebagai tuntutan akan potensi adanya konflik atau benturan kepentingan antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dalam struktur perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat berupa manajemen, pemegang saham, pemegang surat utang, pegawai, pemerintah, *supplier*, pelanggan, dan lain-lain. Tata kelola korporat yang baik membantu perusahaan beroperasi





lebih efisien, memperbaiki akses terhadap modal, mengurangi risiko, dan melindungi salah arus. Untuk mencegah manajer membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tetapi hal itu merugikan orang lain, sistem pengecekan dan keseimbangan diterapkan. Sistem ini yang umum dikenal sebagai tata kelola perusahaan.

Prinsip dasar GCG menurut Daniri ( 2014 :10 ) di sini secara umum ada lima prinsip dasar yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* (TARIF). Prinsip- prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan, naik turunnya harga saham perusahaan, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia Dewan Komisaris atau sebaliknya, Komisaris Utama atau Dewan Komisaris mengambil peran berikut wewenang yang



seharusnya dijalankan Direksi. Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

d. *Independency* (kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian bagi para anggota Direksi mewujudkan dalam keputusan-keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS.

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak *investor* khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.



Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## 2. Teori Keagenan

Menurut Gumanti (2017 : 273) konflik utama yang dianalisis dalam konteks tata kelola korporat adalah hal yang terkait dengan hubungan antara pemegang saham dan manajer. Motif teoritis dari masalah-masalah keagenan sudah dianalisis dalam Jensen dan Meckling (1976), yang mengembangkan teori tentang struktur kepemilikan perusahaan. Fokus khusus dari Jensen dan Meckling (1976) adalah kontrak suatu hubungan keagenan antara pemilik, yang merupakan pemilik luar perusahaan, dan agen yang bisa sebagai pemilik dan sekaligus manajer atau pengusaha. Mereka menunjukkan bahwa jika fraksi ekuitas pemilik-manajer jatuh , sebagai konsekuensi dari semakin banyaknya porsi kepemilikan yang dijual kepada pihak luar (*investor*), agen yang memiliki sifat memaksimalkan utilitas memiliki dorongan untuk memanfaatkan sebagian besar sumber daya-sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam bentuk fasilitas pribadi dan tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja dalam rangka memakmurkan pemegang saham.

Menurut Hamdani (2016:30) teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mengatakan bahwa sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang dan manusia selalu menghindari risiko. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Asumsi teori keagenan ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Pemilik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan akan memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham, sehingga manajer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini dilakukan karena manajer menganggap dia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh *investor*. Faktor pemicu adanya masalah agensi, oleh karena adanya asimetri informasi. Agen cenderung memiliki kemampuan mengendalikan informasi terkait perusahaan ketimbang *principal*. Hal ini disebabkan karena agen lebih banyak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan *principal* sebagai pihak yang mendelegasikan tugas kepada agen, sehingga tidak terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar asimetri informasi, maka akan menyulitkan *principal* untuk mengendalikan tindakan yang dilakukan agen. Ada dua kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* sebagai suatu kondisi dimana agen melanggar kontrak kerja yang telah disepakati antara manajer dengan pemegang saham, antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dengan kreditor, antara pemegang saham dengan *stakeholder* lainnya. *Adverse selection* adalah suatu kondisi dimana *principal* tidak mengetahui apakah suatu keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugasnya.

Menurut Pertiwi dan Pratama (2012). Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja manajemen adalah pemilik (*shareholders*). Untuk kepentingan pemilik itulah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme *Corporate Governance* yang tepat. Dengan mekanisme *Corporate Governance* yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggungjawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik.

### 3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Daniri (98 : 2016) sebagai salah satu organ perusahaan, Dewan Komisaris harus memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi. Bukan hanya itu, Dewan komisaris juga berhak memberi nasihat kepada Direksi jika sewaktu-waktu diperlukan. Dewan komisaris mengawasi direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan. Dewan komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis, baik antara satu sama lain, maupun terhadap direksi. Independen di sini berarti komisaris harus aktif dalam mempertimbangkan bahkan mengkritisi kebijakan strategik direksi dengan kata lain komisaris harus mampu untuk memberikan pandangan yang bersifat independen terhadap direksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Menurut Lukviarman (2016 : 164) dewan komisaris dalam setiap perusahaan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan sedemikian rupa antara; formulasi strategi dan pembuatan kebijakan serta kinerja di satu sisi, dengan pengawasan terhadap direksi dan akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan di sisi lainnya. Hal demikian ditambah dengan peranan fundamental dewan komisaris bahwa *corporate governance* telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan berjalan secara efektif. Jika dewan komisaris terlalu fokus terhadap peran kepatuhan (pengawasan terhadap direksi dan akuntabilitas), maka semakin jelas peran dewan komisaris dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap implementasi *corporate governance* sesuai dengan pedoman, regulasi serta aturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Hamdani ( 2016 : 82) Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.



#### 4. Ukuran Dewan Direksi

Secara umum peranan *Board of Directors* ( BOD ) menurut Niki Lukviarman (2016 : 133) dalam korporasi adalah sebagai ‘ jembatan ‘ antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya anggota BOD harus bertindak secara cermat dan dengan sikap penuh kehati-hatian terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi ini mengharuskan anggota BOD dalam menjalankan fungsinya dengan berperilaku jujur dan niat baik melalui tindakan yang hati-hati sebagaimana individu lain pada posisi yang sama dengan kondisi yang sama akan mengambil keputusan atau tindakan. Peranan BOD tentang rentang tugas dan tanggung jawab cenderung harus diperlebar. Hal ini mengindikasikan perlunya peranan lebih aktif dari BOD di dalam proses bisnis.

Menurut Hamdani (2016 : 86) direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Direksi bertanggung jawab menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun menurut Hamdani (2016 : 88) fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Kepengurusan

Kepengurusan direksi di antaranya:

- (1).Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
- (2).Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien
- (3).Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan
- (4).Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, namun tanggung jawab tetap berada pada direksi
- (5).Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Manajemen Risiko

**C** Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan, sistem dan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi terkait dengan

- (1). Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.
- (2). Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung jawab terhadap pengendalian risiko

**Pengendalian Internal**

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.

**Komunikasi**

Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.

**Tanggung jawab sosial**

Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Ukuran Komite Audit

Menurut Daniri ( 2014: 211 ) pada umumnya, banyak dari pekerjaan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui komite. Sepintas, seperti menciptakan banyak organ dalam perusahaan. Namun, dalam pandangan, *investor* dan *kreditor*, adanya komite justru berpotensi menjadikan *corporate governance* berjalan lebih efektif. Karena itu, tak heran Bursa Efek mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit yang dipimpin oleh Komisaris Independen. Sejak direkomendasikan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Bursa Efek Indonesia mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki Komite Audit yang dipimpin oleh Komisaris independen. Komite Audit biasanya terdiri dari 2 hingga 3 orang anggota. Seperti komite pada umumnya, Komite Audit yang beranggota sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota sedikit memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin, anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Uraian tugas komite audit itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Merekomendasikan suatu akuntan publik untuk menjadi auditor eksternal perusahaan dan untuk mengakhiri hubungan tersebut
- b. Meninjau penunjukan dan penggantian auditor internal
- c. Berfungsi sebagai sebuah saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan komisaris, dan antara auditor internal dengan dewan komisaris
- d. Meninjau hasil setiap audit eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- e. Meninjau laporan keuangan tahunan dan perselisihan antara manajemen dan auditor eksternal yang timbul dalam mempersiapkan laporan keuangan
- f. Melakukan pengawasan dengan berkonsultasi pada auditor eksternal dan auditor internal. Pengawasan ini harus dirancang untuk menjamin laporan keuangan perusahaan dilaporkan kepada publik secara baik dan memadai sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima publik

Menurut Lukviarman (2016 : 205 ) dewan komisaris akan mendelegasikan dan mengandalkan efektivitas komite audit untuk memastikan keseimbangan dan dapat dipahaminya hasil penilaian terhadap posisi dan prospek keuangan perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya seperti institusi perpajakan. Dewan komisaris juga mengandalkan keberadaan komite audit untuk memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara baik dan optimal, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan investasi pemilik serta aset perusahaan. Lebih lanjut, keberadaan komite audit juga diharapkan dapat memastikan; transparansi laporan keuangan perusahaan telah memenuhi standar, penerapan berbagai prinsip pengendalian internal, serta menjaga hubungan melalui komunikasi yang efektif dengan auditor eksternal.

## 6. Kinerja Perusahaan

Menurut Prihadi (2013 :138) salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba. Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para *investor* dan analis. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seorang *investor* akan



mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasinya.

Menurut Utari, Purwanti, dan Prawironegoro (2014 :63) laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Analisis profitabilitas terdiri dari beberapa analisis salah satunya *Return on Equity*.

Menurut Hamdani (2016: 136 ), tujuan implementasi GCG adalah menciptakan kesejahteraan bagi para pemegang saham melalui pencapaian kinerja keuangan. Ukuran kinerja keuangan salah satunya ROE. ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan *investor* tertarik menanamkan modal. Sebaliknya, jika ROE yang rendah *investor* kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Asnawi dan Wijaya (2016 : 28 ) bagi pemegang saham, ukuran laba adalah ROE, dan yang terbaik bagi pemegang saham, adalah ROE yang tinggi.

## C. Penelitian Terdahulu

1.

Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Badan
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

	Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)
Peneliti	Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2017)
Hasil Penelitian	komite audit terbukti positif signifikan terhadap kinerja perusahaan

Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2012)
Peneliti	Tangguh Wicaksono dan Raharja, 2014
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE</li><li>dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE</li></ul>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• ukuran komite audit tidak signifikan mempengaruhi ROE (Return on Equity).</li></ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN
Peneliti	Sulistiyowati, 2017
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>• dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li><li>• dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li><li>• komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li></ul>

Judul Penelitian	Komposisi Dewan Perusahaan dan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan–Perusahaan Sub Sektor Ritel,
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**5.**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

	Media dan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)
Peneliti	Ron Imron Rosadi, 2016
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA dan PBV</li><li>• Ukuran dewan direksi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kedua variabel kinerja yang diukur dalam penelitian yakni ROA dan PBV</li></ul>

Judul Penelitian	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR Go Public
Peneliti	ANDRI VENO, 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi berpengaruh signifikan Positif meningkatkan Return on Equity (ROE).</li> <li>• Total Dewan Komisaris Tidak mempunyai pengaruh yang signifikan meningkatkan Return on Equity(ROE).</li> <li>• Komite Audit berpengaruh signifikan Positif meningkatkan Return on Equity(ROE).</li> </ul>
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Menurut Lukviarman (2016 : 165) Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas yang berhubungan dengan aspek kepatuhan dengan tetap memiliki komitmen dan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Dalam kaitan ini dewan komisaris melaksanakan peran mereka melalui fungsi pengarahan terhadap perusahaan, meyakinkan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan arahan yang diharapkan, memahami potensi risiko serta menetapkan berbagai arahan untuk masa depan perusahaan. Kondisi ini mengisyatkan bahwa peranan dewan komisaris berjalan seimbang antar aspek kepatuhan dan aspek kinerja.



Dengan adanya pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja manajemen dapat mengurangi tindakan kecurangan dan perilaku oportunistik manajemen karena dewan komisaris mengawasi kinerja manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan *return* (laba) dan kesejahteraan pemilik. Dengan demikian, manajer akan berusaha meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar (Tertius dan Christiawan, 2015). Menurut teori keagenan dewan komisaris bertugas untuk memantau kinerja Direksi agar bekerja sesuai amanah dari pemegang saham.

## 2. Ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

Menurut Hamdani (2016 : 86) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Menurut Sukandar dan Rahardja (2014) Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Sulistyowati (2017) Dewan direksi merupakan mekanisme yang sangat penting dalam GCG, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan.



### 3. Ukuran dewan komite audit terhadap kinerja perusahaan

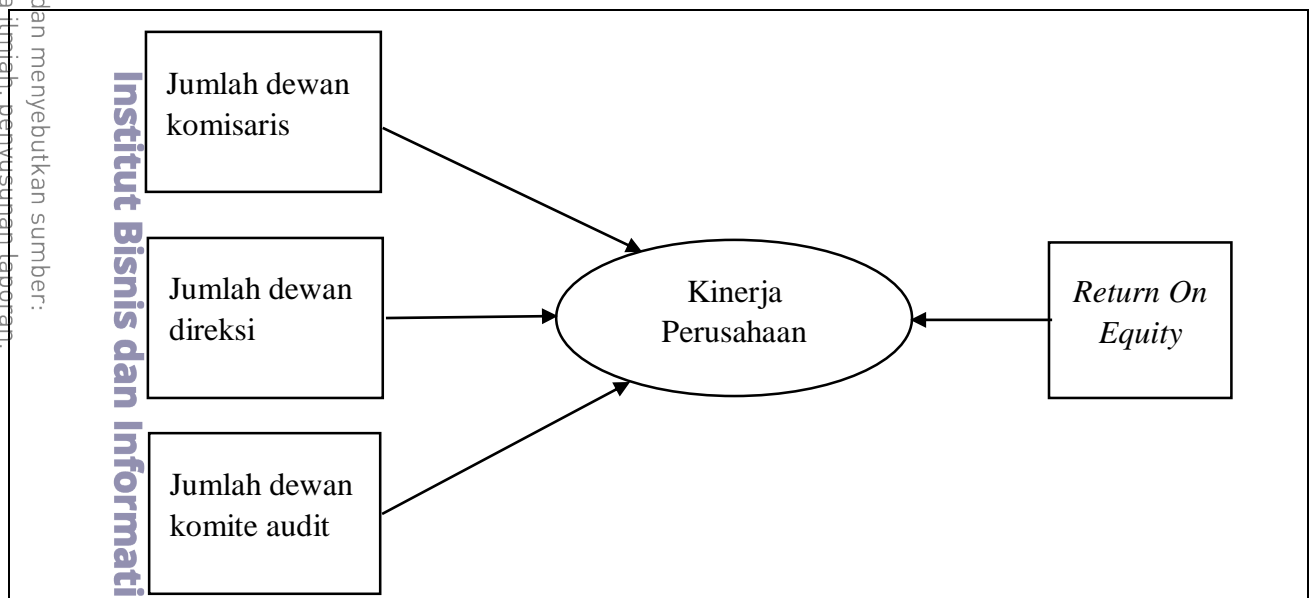
Menurut Niki Lukviarman (2016 : 204) peranan mendasar dan esensial dari komite audit adalah untuk bertindak sebagai “jembatan” antar Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen perusahaan dengan dewan komisaris. Hal demikian menutup kemungkinan dan peluang pihak komisaris (non-independen) dan direksi untuk berhubungan untuk lebih dekat dengan KAP yang berpotensi dapat mempengaruhi hasil audit sebelum diserahkan kepada institusi dewan komisaris.

Menurut Sarafina dan Saifi (2017) komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin baik dan monitoring terhadap manajemen semakin tinggi karena semakin efektif pengawasan komite audit akan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan.

### E. Hipotesis Penelitian

Gambar 2.1

Model Empirik Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang ada, maka terbentuklah

hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

H<sub>2</sub> : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

H<sub>3</sub> : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Hak Cipta © IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

